

ABSTRAK

Joseph Bryan Runkat (00000021571)

“IMPLEMENTASI PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH KREDITOR SESUAI DENGAN HUKUM KEPAILITAN”

(xii+102 halaman; 1 grafik; 2 lampiran)

Implementasi pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki celah untuk diajukan secara tidak sesuai dengan tujuan pokok prosedur tersebut diadakan. Dalam implementasi pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang terdapat sebuah instrumen yang memiliki peran besar, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam skripsi ini, penulis akan memusatkan pada tujuan utama pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditur dalam perbandingannya dengan pasal yang berlaku dalam undang-undang tersebut dan dalam perbandingannya dengan asas-asas yang sesuai dengan tujuan implementasi dari prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang serta melihat kepada kasus pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditur yang berujung kepailitan untuk termohon. Pada kenyataanya prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang masih belum memiliki kepastian hukum untuk menolong termohon penundaan kewajiban pembayaran utang untuk mendapat hasil dari penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu restrukturisasi dalam rekonsiliasi, bahkan di sisi lain mendapatkan pernyataan pailit dan harus di likuidasi. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan undang-undang yang disertai dengan pendekatan kasus sebagai pendukung pembahasan serta sedikit bagian dari pendekatan doktrin yang mengacu pada asas dari prosedur tersebut. Pembahasan tersebut akan berfokus kepada pertanyaan di atas, bahwa bagian mana dari prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang yang belum optimal untuk menghasilkan prosedur yang terjamin sesuai dengan asas-asas yang berlaku. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa memang dari segi undang-undang masih belum memberi kepastian untuk memastikan hasil akhir dari pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk mendapatkan penundaan kewajiban pembayaran utang bagi termohon.

Refrensi: 29 (1982-2019)

Kata kunci: kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, perusahaan terbatas, prosedur sidang pkpu

ABSTRACT

Joseph Bryan Runkat (00000021571)

“THE IMPLEMENTATION OF FILING SUSPENSION OF PAYMENT BY CREDITOR IN ACCORDANCE WITH BANKRUPTCY LAW”

(xii+102 pages; 1 graphic; 2 appendices)

The implementation of the suspension of debt payment obligation has a hole to be submitted not in accordance with the main purpose of the procedure. In the implementation of the submission of the suspension of debt payment obligation, exists a major role instrument, namely: Law Number 37 year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. In this research paper, the author will focus on the main purpose of filing a suspension of debt payment obligations by creditors in comparison with the applicable article in the law and in comparison with the principles in accordance with the objectives of the implementation of the procedure for suspension of the payment obligations and looking at the case submission of suspension of debt payment obligations by creditors which ends in bankruptcy for the respondent. In fact, not only the procedure of suspension of debt payment obligation still does not have legal certainty to help the respondent to obtain the results of the debt payment delay which is restructuration in reconciliation, but also is given bankruptcy statements and must be liquidated. The author uses the method of normative legal research using a statutory approach accompanied by a case approach as a supporter of the discussion as well as a small part of the doctrinal approach that refer to the principles of the procedure. The discussion will focus on the question above, which part of the procedure for suspending debt payment obligations has not been optimal to produce a guaranteed procedure in accordance with applicable principles. Based on the review conducted, it can be concluded that indeed in terms of the law, the procedure still does not provide certainty to ensure the final result of submitting the suspension of debt payment obligation is to obtain a suspension of debt payment obligation for the respondent.

Reference: 29 (1982-2019)

Keyword: bankruptcy, suspension of debt payment obligation, limited liability company, suspension of debt payment obligation proceeding